



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NOVIE RIYANTO RAHARDJO**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **260349**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 9.132.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 430 m²/400 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 3.850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 390 m²/300 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 203 m²/90 m² di KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
4. Tanah Seluas 400 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 91.000.000
5. Tanah Seluas 400 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 91.000.000
6. Tanah Seluas 290 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
7. Tanah Seluas 1525 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.340.000.000

1. MOBIL, MINI COOPER HATCHBACK, COUNTRYMAN COOPER S Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
2. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000
3. MOBIL, MERCEDES 280 GE Tahun 1986, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 602.200.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.275.207.315**F. HARTA LAINNYA** Rp. 54.703.747



Sub Total	Rp.	15.404.111.062
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	15.404.111.062

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.